



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK PADA PUTUSAN
NOMOR 127/PID.SUS/2017/PN BBS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**ADE LUTFI ARDHAN
NPM. 5117500001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI


**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK PADA PUTUSAN NOMOR
127/PID.SUS/2017/PN.BBS**

Diusun Oleh :

**ADE LUTFI ARDHAN
NPM. 5117500001**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :**

Pembimbing I


SISWANTO, S.H., M.H
NIDN. 0013126401

Pembimbing II


FAJAR DIAN ARYANI, S.H., M.H
NIDN. 0608087702

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP
ANAK PADA PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2017/PN.BBS**

Oleh :

**ADE LUTFI ARDHAN
NPM 5117500001**

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :

Hari : Sabtu

Tanggal : 20 Februari 2021

Penguji I



Dr. H. SANUSI, S.H., M.H.
NIDN. 0609086202

Penguji II



H. TONI HARYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0020045801

Pembimbing I



SISWANTO, S.H., M.H.
NIDN. 0013126401

Pembimbing II



FAJAR DIAN ARYANI, S.H., M.H.
NIDN. 0608087702

**Mengetahui
Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal**



Dr. H. Achmad Irfan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ade Lutfi Ardhan**
NPM : 5117500001
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 12 April 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak pada Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 15 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Ade Lutfi Ardhan

ABSTRAK

Ade Lutfi Ardhan. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak pada Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs.* Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2021.

Tindak pidana persetubuhan sebagaimana diketahui merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bertentangan dengan kesusialaan. Bahkan apabila yang menjadi korban itu adalah anak, secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa. Semakin banyaknya kejahatan kesusialaan menjadikan masyarakat cemas, terutama pada orang tua. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dasar dan penerapan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Dasar hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs menggunakan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang merupakan "*lex specialis derogate lex generalis*" dari pasal-pasal terkait persetubuhan dalam KUHP, sehingga penggunaannya harus didahulukan dari pasal-pasal dalam KUHP. Sedangkan Pasal 64 ayat (1) KUHP digunakan sebagai dasar perbuatan berlanjut; 2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Persetubuhan, dan Anak.

ABSTRACT

Ade Lutfi Ardhan. *Judicial Review of the Crime of Intercourse Against Children in Decision Number 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs.* Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2021.

As it is known, the criminal act of intercourse is an act which is prohibited by religion and is contrary to adultery. Even if the victim is a child, physically they do not have sexual attraction like adults. The increasing number of adversity crimes makes people anxious, especially for the elderly. The criminal act of intercourse against children, is included in one of the legal issues which is very important to be studied in depth.

This study aims to determine the basis and application of the criminal act of sexual intercourse against children in decision Number 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs. This type of research includes library research with a normative legal research approach. The main data source used is secondary data with the method of collecting literature study data and documents. The data analysis method was carried out by qualitative normative method with qualitative descriptive analysis.

The results of this study concluded that 1) The legal basis for the criminal act of sexual intercourse against children in Decision Number 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs uses Article 81 paragraph (2) of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code which is a "lex specialist derogate lex generalis" of articles related to sexual intercourse in the Criminal Code, so its use must take precedence over the articles in the Criminal Code. Meanwhile, Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code is used as the basis for continuing actions; 2) The application of criminal law against the criminal act of sexual intercourse against children in decision Number 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs based on evidence, testimony of witnesses, and statements of the defendant, as well as facts revealed in court are appropriate because they have fulfilled the The elements of the criminal act of sexual intercourse against children as in Article 81 paragraph (2) of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code is legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of persuading children to have intercourse with him which is carried out continuously.

Based on the results of this study, it is hoped that it will become material for information and input for students, academics, practitioners, and all those in need in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal.

Keywords: Crime, Intercourse, and Children.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- Semua keluargaku, yang telah memberikan kebahagiaan hidup dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
- Almamater tercinta UPS Tegal.

MOTTO

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:

“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Katakanlah kepada wanita yang beriman:

“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.”

(QS An-Nur: 30-31)

“Sesungguhnya memandang (wanita) adalah salah satu panah beracun dari berbagai macam anak panah iblis. Barangsiapa menahan pandangannya dari keindahan-keindahan wanita karena takut pada-Ku, maka Allah mewariskan kelezatan iman di dalam hatinya.”

(H.R. Thabrani).

“Janganlah seorang laki-laki dan wanita berkhawat (berduaan di tempat sepi), sebab setan menemaninya, janganlah salah seorang dari kalian berkhawat dengan wanita, kecuali disertai dengan mahramnya.”

(HR. Bukhari & Muslim).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat di atasi. Pada kesempatan ini ucapan terima penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, 15 Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PADA ANAK	20
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
3. Jenis Tindak Pidana	29
B. Tinjauan Umum tentang Persetubuhan	31
1. Pengertian Persetubuhan	31
2. Persetubuhan dengan Paksaan dalam KUHP	33
3. Persetubuhan Tanpa Paksaan dalam KUHP	39
C. Tinjauan Umum tentang Anak	46

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A.	Dasar Hukum Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak	48
B.	Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/ 2017/PN Bbs	61
BAB IV	PENUTUP	74
A.	Simpulan	74
B.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan suatu karunia Tuhan YME, dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki orang dewasa umumnya. Jadi, anak juga sudah semestinya mendapatkan suatu perlindungan hukum supaya dapat terlindungi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak menjadi generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara.

Kemajuan teknologi dan informasi yang begitu pesat ternyata berdampak pula pada dunia kejahatan. Kejahatan terhadap kesusilaan adalah salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Di Indonesia sendiri, sudah dimuat beberapa pasal dalam KUHP tentang larangan zina dan perzinaan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia.

Perbuatan zina dalam Pasal 284 KUHP merupakan hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.¹ Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di

¹ Djubaedah, Neng, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010, hal. 65.

luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana persetubuhan sebagaimana diketahui merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bertentangan dengan kesusialaan. Bahkan apabila yang menjadi korban itu adalah anak, secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa. Menurut Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019 dari Komnas Perempuan, dari 2.341 kasus kekerasan terhadap anak perempuan tahun ini, ada persetubuhan sebanyak 503 kasus.² Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur juga marak terjadi di Brebes. Tahun 2020, setahun terakhir Kejaksaan Negeri Brebes mencatat ada 12 perkara yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri.³

Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena

² CNN Indonesia. (2020). *Inses Kekerasan Seksual Terbanyak Pada Perempuan*. Online: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200224173721-12-477607/inses-kasus-kekerasan-seksual-terbanyak-pada-anak-perempuan>. (cnnindonesia.com, 07 Maret 2020).

³ PanturaPost. (2021). *Marak Pencabulan Anak di Brebes, Kejaksaan Ancam Kebiri Kimia Bagi Pelaku*. Online: <https://kumparan.com/panturapost/marak-pencabulan-anak-di-brebes-kejaksaan-ancam-kebiri-kimia-bagi-pelaku-1v1RFH8f1wL>. (Kumparan.com, 21 Januari 2021).

suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Sebagaimana diketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi.

Anak menurut Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Undang-Undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Kesejahteraan anak maupun di Undang-undang peradilan anak. Kejaksaan Negeri Brebes berkomitmen menuntut terdakwa pelaku pelecehan seksual anak dengan hukuman berat yang maksimal. Karena, perbuatan asusila tersebut meresahkan masyarakat. Terdakwa pelaku

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal. 22.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002, *Perlindungan Anak*, Bandung: Cipta Umbara, 2012, hal. 78.

pelecehan seksual seperti persetubuhan kepada anak ataupun pencabulan kepada anak, kita tuntutan berat dan termasuk tambahan hukuman.⁶

Semakin banyaknya kejahatan kesusialaan menjadikan masyarakat cemas, terutama pada orang tua. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini akan mengkaji tindak pidana persetubuhan pada anak dalam putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN BBS, pada putusan tersebut terdakwa Wasro Bin Talib dituntut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas tuntutan tersebut Penasehat hukum terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tertanggal 7 November 2017 yang pada pokoknya penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa Wasro bin Talib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memenuhi unsur-unsur sebagaimana diuraikan penuntut umum yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut atau membujuk anak

⁶ PanturaPost. (2021). *Marak Pencabulan Anak di Brebes, Kejaksaan Ancam Kebiri Kimia Bagi Pelaku*. Online: <https://kumparan.com/panturapost/marak-pencabulan-anak-di-brebes-kejaksaan-ancam-kebiri-kimia-bagi-pelaku-1v1RFH8f1wL>. (Kumparan.com, 21 Januari 2021).

melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut. Namun menurut Penasehat hukum terdakwa semua keterangan saksi di persidangan kecuali saksi Jahrotun binti Rismono tidak didukung alat bukti lain yang bersesuaian karena saksi-saksi tersebut bukan saksi fakta tetapi *testimonium de audito* yang tidak mengetahui adanya perbuatan pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa dan bukti surat berupa *visum et repertum* adalah bukti terdapat tanda Jahrotun habis melahirkan dengan cara Caesar bukan bukti adanya persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Jahrotun.

Selain penasehat hukumnya yang mengajukan pledoi atau pembelaan terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 7 Nopember 2017 yang pada pokoknya terdakwa merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya, terdakwa mengakui karena kasihan dengan orang tua terdakwa yang sakit-sakitan dan istri terdakwa sedang mengandung sehingga terdakwa mohon putusan yang seadiladilnya.

Pada kasus tersebut, saksi Jahrotun adalah saksi fakta yang mengetahui sendiri secara langsung dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya karena terdakwa mempunyai hak ingkar yang tidak perlu Jaksa Penuntut Umum buktikan adalah anak perempuan yang dilahirkan secara Caesar oleh saksi anak Jahrotun, adalah benar anak biologis terdakwa atau bukan tetapi cukup berdasarkan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang menunjuk ke satu arah yaitu benar terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Jahrotun. Sehingga penasehat hukum terdakwa mencari kebenaran materiil dengan tidak akan membela terdakwa apabila hasil tes DNA menunjukkan

positif bayi jenis kelamin perempuan yang lahir cara Caesar dari Jahrotun akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi Jahrotun namun apabila hasil DNA tersebut terbukti negatif maka Wasro haruslah dibebaskan.

Undang-undang tentang Perlindungan Anak menetapkan dengan memberi bentuk perlindungan terhadap anak berdasarkan asas non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, dan penghormatan terhadap anak dalam menyatakan pendapatnya. Faktanya hak terhadap anak masih belum dapat terlaksana, karena perbuatan persetubuhan yang dilakukan kepada anak masih banyak terjadi, maka bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak. Negara Indonesia merupakan negara hukum dan menjamin perlindungan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sehingga wajib dilindungi dari segala perlakuan yang mengakibatkan terjadinya suatu pelanggaran dan perbuatan yang merugikan bagi anak.

Pembuktian perkara tindak pidana persetubuhan sering kali sulit untuk dibuktikan karena berdasarkan Pasal 183 KUHP untuk menentukan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa minimal harus ada dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adanya Pasal tersebut semakin sulit seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman, sebab saksi yang dihadirkan dipersidangan harus secara

langsung mengetahui perbuatannya itu tetapi jarang sekali ada saksi yang mengetahui tindak pidana secara langsung kecuali tindak pidana persetubuhan itu tertangkap basah atau pelaku lebih dari satu orang.

Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Bagian inti delik dari Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah bersetubuh dengan perempuan diluar kawin, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin. Selanjutnya dalam Pasal 287 (2) disebutkan penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam Pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya. Jika rumusan dalam Pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 (dua

belas) tahun dan belum mencapai lima belas tahun. Di dalam tindak pidana aduan/delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hukum pidana di Indonesia berlaku asas *lex Specialis derogate lex generalis*, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan, maka penulis tertarik mengkaji tindak pidana persetubuhan terhadap anak melalui penelitian hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak pada Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN.BBS).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah di atas, untuk memudahkan penulisan, terhadap permasalahan tersebut penulis merumuskan ke dalam dua pertanyaan penelitian.

1. Bagaimana dasar hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dari secara teoritis maupun dari segi praktis.

1. Secara teoritis, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum, khususnya terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam menentukan dasar hukum dan menerapkan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
2. Secara praktis, tulisan ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan hukum pidana persetubuhan sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan terhadap kesusilaan serta bagi orang tua anak yang menjadi korban persetubuhan dapat memahami prosedur mencari keadilan untuk menjerat dan membuat efek jera pada pelaku.

E. Tinjauan Pustaka

Yunastian & Purwoto (2013), "*Aspek Hukum Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan PN Banyumas Nomor 74/Pid.Sus/2013/PN Bms Tahun 2013)*." Tindak pidana asusila merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak, serta dinilai tidak etis, melanggar norma kesopanan serta norma kesusilaan. Ketidakmampuan anak untuk melawan dan rasa takut yang dimiliki membuat anak rentan menerima perbuatan tindakan asusila dari laki-laki yang notabene lebih dewasa dari pada perempuan. Perlindungan yang diberikan untuk melindungi hak-hak anak merupakan salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan, seperti pada perkara dengan nomor putusan 74/Pid.Sus/2013/PN Bms.

Hasil penelitian mengungkapkan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap Korban Tindak Pidana Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan pada Perkara Nomor 74/Pid.Sus/2013/PN Bms adalah perlindungan langsung yang meliputi upaya penanganan cepat, pemberian aksesibilitas, penjaminan perlindungan dan pendampingan, serta atas dasar *Convention On The Rights of the Child* dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hutagalung, dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul "*Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan pada Anak (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202 K/Pid.Sus/2009)*".

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dengan ketentuan tentang pelecehan seksual menurut hukum pidana di Indonesia, penegakan hukum pidana dalam *judex facti* dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 2417/Pid.B/ 2008-Mdn, *juncto* dengan Putusan Nomor 38/Pid/2009/PT-Mdn, dan bagaimana penegakan hukum pidana dalam *judex juris* tentang Pelecehan Seksual terhadap Anak berdasarkan Putusan No. 1202K/Pid.Sus/2009. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analitik preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam KUHP, Undang-Undang No. 23/2003 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penegakan hukum pidana *judex facti* berdasarkan Putusan Nomor 2417/Pid.B/2008-Mdn *juncto* Putusan Nomor 38 /Pid/2009/PT-Mdn sejalan dengan hukum acara pidana. Pemberian putusan didasarkan pada teori otentikasi menurut hukum secara negatif dan mengikuti teori kesalahan meskipun kesalahan korban tidak dipertimbangkan. Penegakan hukum pidana dalam *judex juris* berdasarkan Putusan Nomor 1202K/Pid.Sus/2009 sejalan dengan hukum acara pidana dan mencerminkan teori kesalahan korban.

Widyawati, Mega (2018). Tindak Pidana Persetubuhan pada Anak Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Jurnal USM Law Review, Vol. 1, No. 1, ISSN 2621-4105. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana persetubuhan apada anak ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Para remaja yang masih mencari jati dirinya menjadikan salah

pergaulan dan salah menggunakan teknologi yang ada. Akibatnya semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan pada usia muda, usia yang seharusnya untuk mencari ilmu. Metode yang digunakan yuridis normatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa banyaknya pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak menurut hukum positif dan hukum Islam, selain itu juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak menurut hukum positif dan hukum Islam didasarkan pada dakwaan, pembuktian, fakta-fakta dalam persidangan, tuntutan, unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terpenuhi. Temuan atau kesimpulan adalah dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan jika ditinjau dari hukum positif dapat diberikan sanksi pidana penjara dan sanksi denda, apabila dari hukum islam dapat diberikan sanksi dera atau cambukan 100 kali kedua belah pihak yang melakukan zina. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku harus berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan serta pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis.

Penelitian selanjutnya dilakukan Prasetyo (2019) dengan judul “*Peran Anak sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan*”. Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Permasalahan dalam tesis ini yaitu: kausalitas

terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban dan *ratio decidendi* putusan hakim dalam mempertimbangkan peran anak sebagai pemicu terjadinya tindak pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 285/Pid.Sus/2016/PN.Njk termasuk kedalam jenis korban *provocative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan. Jenis korban semacam ini merupakan korban yang aktif dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan. Ironisnya dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 285/Pid.Sus/2016/PN.Njk., Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan jenis korban dan peran dari korban sehingga terjadi tindak pidana. Sedangkan dalam Putusan Nomor: 91/Pid.Sus/2018/PN.NJK. termasuk kedalam jenis korban *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban. Berdasarkan duduk perkara sebagaimana putusan Nomor: 91/Pid.Sus/2018/PN.NJK. korban sudah berusaha menolak ajakan terdakwa, tetapi karena korban tidak berdaya karena kelemahan fisiknya sebagai seorang perempuan, akhirnya terdakwa dengan leluasa melakukan tindak pidana persetubuhan.

Prakoso (2019) judul penelitian "*Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana terkait Persetubuhan yang Korbannya Anak melalui Upaya Pembujukan*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.GSK, Nomor

149/Pid.Sus/2017/PN.GSK dan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.GSK tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif normatif, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.

Hasil penelitian Prakoso diperoleh hasil bahwa implementasi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.GSK, Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.GSK dan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.GSK tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah terpenuhi unsur setiap orang/barang siapa; unsur dengan sengaja; dan unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Majelis Hakim Pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar lima puluhjuta rupiah, subsidair 3 bulan penjara untuk Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN.GSK. Untuk Putusan Nomor 149/Pid. Sus/2017/PN.GSK menjatuhkan pidana selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar lima puluh juta rupiah, subsidair 2 bulan penjara, Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.GSK menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar lima pjuhjuta rupiah, subsidair 4 bulan penjara..

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Janis penelitian termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan karena sumber data utamanya berasal dari dokumen, seperti undang-undang, putusan pengadilan dan lainnya sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar dasar hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian normatif bermaksud menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.⁷

⁷ Fajar ND, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 153.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap prakteknya.⁸

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berisi segala peraturan yang mengatur tentang persetubuhan terhadap anak, dalam hal ini difokuskan pada peraturan perundang-undangan dan contoh putusan pengadilan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Maka sumber dan jenis bahan penelitian yang digunakan, meliputi:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan sifatnya tidak mengikat. Contohnya, hasil-hasil

⁸ *Ibid.*, hal. 51.

penelitian hukum, literature (buku-buku ilmiah) hukum resmi maupun tidak resmi diterbitkan, jurnal, media massa, dan makalah-makalah.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya ialah ensiklopedia, kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi Kepustakaan, diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.⁹

Penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian permasalahan penelitian. Data yang penulis cari yaitu materi hukum akta di bawah tangan pada perjanjian jual beli dan dokumen-dokumen yang berkaitan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika

⁹ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hal. 21.

artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai dasar hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs.

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan dokumen merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dari yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dan eksplanatoris. Maksudnya bahwa peneliti nantinya akan menggambarkan fakta-fakta dan data-data yang didapat dari hasil penelitian. Kemudian ditindak lanjuti dengan menerangkan data-data dan fakta-fakta yang sudah digambarkan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tindak Pidana Persetubuhan pada Anak. Bab ini membahas tinjauan umum tentang tindak pidana, meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis tindak pidana; tinjauan umum tentang persetubuhan, meliputi pengertian persetubuhan, persetubuhan dengan paksaan dalam KUHP, persetubuhan tanpa paksaan dalam KUHP; dan tinjauan umum tentang anak.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dasar hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs.
- Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis yang bersifat membangun terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PADA ANAK

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam ilmu hukum pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang merupakan istilah resmi dalam “*Wetboek van Strafrecht*” yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masih berlaku di Indonesia sampai sekarang. Ada beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan *Stafbaar Feit*, diantaranya tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan Pidana.¹⁰

Tresna dan Utrescht menggunakan istilah beberapa terjemahan yang lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum atau perbuatan yang dapat dihukum.¹¹ Prodjodikoro menerangkan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹² Jonkers menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan

¹⁰ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hal.193.

¹¹ Kansil, C.S.T. & Christine, S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007, hal. 37.

¹² Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelel, Pidana, Tindak pidana, Teori-teori, Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 75.

dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁴ Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut *dualism*. Selain pandangan dualisme, ada pandangan lain yakni pandangan *monoisme* yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada banyak ahli hukum yang berpandangan monoisme ini, dalam pendekatan terhadap tindak pidana seperti yang dikemukakan Prodjodikoro dan Jonkers.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

¹³ *Ibid*, hal. 71.

¹⁴ *Ibid*, hal. 75.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Dari beberapa istilah yang dipergunakan para ahli hukum tersebut sebagai terjemahan delik (*strafbaarfeit*), menurut penulis tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung pemakaiannya. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat aturan hukum pidana dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Jadi penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud pengertian tindak pidana adalah tindakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

¹⁵ Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidahaan (Disertasi Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentas)*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012, hal. 21.

tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana sebagai suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.

Menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, pertama harus dibahas adalah suatu tindakan manusia, karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁶

a. Unsur Subjektif

Menurut Leden, unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga bentuk, yakni: kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*),

¹⁶ Leden, Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar. Grafika, 2009, hal. 9.

kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*). Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yakni tak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.¹⁷

b. Unsur Objektif

Menurut Leden, unsur objektif merupakan unsure dari luar diri pelaku yang terdiri empat unsur, yaitu: *pertama*, perbuatan manusia (berupa *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *omission* (yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan), *kedua*, akibat (*result*) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya, *ketiga*, keadaan-keadaan (*circumstances*). Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan, dan *keempat*, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hal. 9.

¹⁸ *Ibid*, hal. 9.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari: sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, dan kausalitas.
- b. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, macam-macam maksud (seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya), merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dan perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁹

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechmatig*), dan dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband*

¹⁹ Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016, hal. 50.

stand).²⁰ Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur adanya perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam syarat formal, dan bersifat melawan hukum. Selanjutnya jonkers menyebutkan unsur-unsur tindak pidana antara lain perbuatan (yang), melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dan dipertanggungjawabkan.²¹

Menurut Moeljatno (Leden Marpaung, 2009:10), tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, bisanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Selanjutnya Lamintang, unsur tindak pidana terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif, Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsure yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan,²² yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yang dimaksud oleh Lamintang adalah:

²⁰ Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2012, hal. 12.

²¹ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011, hal. 81.

²² Leden, Marpaung, *Op Cit.*, hal. 10.

- a. Kkesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²³

Kemudian unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yang dimaksud Lamintang adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kualitas, yakni hubungan dari suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁴

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan-peraturan perundang-undangan.²⁵

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

²³ *Ibid.*, hal. 11.

²⁴ *Ibid.*, hal. 10.

²⁵ Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005, hal. 72.

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.²⁶

J.E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁷ Dari batasan yang dibuat oleh Jonkers (penganut paham *monoisme*) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.²⁸

Setiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, perbuatan yang mengandung akibat yang ditimbulkan. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, bisanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Walaupun rincian yang dibuat Vos dan Jonkers di atas tampak berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur yang mengenai dirinya. Pendapat Lamintang yang menjelaskan bahwa unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pribadi si pelaku adalah tepat, tetapi yang tersebut pada butir 2, 3 dan 4 unsur subjektif, pada hakikatnya termasuk jenis kesengajaan pula.

²⁶ *Ibid.*, hal. 80.

3. Jenis Tindak Pidana

Pembagian hukum pidana di Indonesia dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP membagi ke dalam dua jenis tindak pidana yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).²⁹ KUHP sebelum tahun 1918 dikenal tiga jenis tindak pidana, yaitu kejahatan-kejahatan (*misdraden*), perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijfven*), dan pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian tiga jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku *Code Penal Perancis* sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan tiga pembagian yaitu *misdraden: crimes*, *wanbedrijfven: delits*, dan *overtredingen: contraventions*.³⁰

Mencermati uraian di atas menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku Kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”.³¹

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana

²⁷ *Ibid.*, hal. 75.

²⁸ *Ibid.*, hal. 81.

²⁹ Ariman, Rasyid & Raghil, Fahmi, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015, hal. 72.

³⁰ *Ibid.*, hal. 72.

³¹ *Ibid.*, hal. 73.

formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.³²

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*), misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP dan kealpaan (*delik culpa*), misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.³³

³² Ali, Mahrus, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 102.

³³ *Ibid.*, hal. 102.

B. Tinjauan Umum tentang Persetubuhan

1. Pengertian Persetubuhan

Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan. Menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat. Secara umum yang dimaksud persetubuhan merupakan peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani,

Beberapa pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinahan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Perbuatan zina atau mukah, menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.³⁴

Persetubuhan diatur dalam KUHP Buku II dengan titel tindak pidana kesusilaan. Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Selanjutnya Pasal 286 KUHP,

³⁴ Djubaedah, Neng, *Op Cit.*, hal. 65.

mengatur bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHP yang korbannya diisyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan. Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.³⁵ Bagian inti delik dari pasal di atas adalah bersetubuh dengan perempuan di luar kawin dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Selain pasal-pasal di atas, pasal berikutnya yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 288 KUHP, yang menyatakan bahwa dimana korban dan pelaku tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau merupakan suami istri, korban harus berusia belum 15 tahun dan karena persetubuhan tersebut korban menderita luka-luka, luka berat ataupun meninggal dunia. Rumusan baru tentang persetubuhan terhadap anak, yaitu memasukkannya unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat menipu dan isinya tidak benar, namun menimbulkan

³⁵ Djubaedah, Neng, *Op Cit.*, hal. 211.

kepercayaan bagi orang lain. Sekilas orang menganggap bahwa antara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah satu hal yang sama, namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu dalam tipu muslihat lebih diartikan perbuatan yang menimbulkan kepercayaan pada sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Sementara serangkaian kebohongan lebih diartikan kepada perkataan pelaku.

Rangkaian kebohongan ini terdapat tiga unsur, yaitu perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain. Perubahan dalam pengaturan pencabulan atau persetubuhan ini tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tidak terdapat perubahan yang mencolok. Perubahannya hanya pada pidana penjara minimal berubah menjadi 5 (lima) tahun dan denda paling banyak berubah menjadi Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

2. Persetubuhan dengan Paksaan dalam KUHP

Persetubuhan dengan paksaan umumnya lebih dikenal dengan istilah pemerkosaan. Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Organisasi Kesehatan Dunia mengartikan pemerkosaan sebagai penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda, bahkan jika dangkal dengan cara pemaksaan baik fisik atau non-fisik.

Sedangkan Mahkamah Kejahatan Internasional untuk Rwanda tahun 1998 merumuskan pemerkosaan sebagai invasi fisik berwatak seksual yang dilakukan kepada seorang manusia dalam keadaan atau lingkungan yang koersif.³⁶

Tindak pidana pemerkosaan (*verkrachting*) diatur secara spesifik dalam Pasal 285 KUHP. Jika pemerkosaan itu mengakibatkan korbannya mati maka pelaku diancam hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun (Pasal 291 ayat 2 KUHP). Merujuk ketentuan Pasal 285 KUHP di atas dapat diambil beberapa syarat penting yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan sebagai pemerkosaan yaitu:

- a. Adanya hubungan kelamin di luar perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholitdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁸

Van Vemmellen dan Van Hattum berpendapat bahwa untuk adanya suatu perbuatan hubungan kelamin tidak disyaratkan telah terjadinya suatu *ejaculation seminis*, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita. Arrest tanggal 5 Februari 1912

³⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerkosaan>. (Online 03 Januari 2021).

³⁷ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

W. 9292 *Hoge Raad* memutuskan bahwa suatu persinggungan di luar antara alat-alat kelamin pria dan wanita bukan merupakan persatuan antara alat-alat kelamin yang diperlukan dalam suatu perkosaan. Kiranya cukup jelas tulis P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang bahwa yang tidak dikehendaki oleh ketentuan Pasal 285 KUHP adalah timbulnya akibat berupa dimasukkannya penis pelaku ke dalam vagina korban, sehingga pasal ini dapat dikatakan sebagai delik materil.³⁹

Merujuk pendapat di atas, maka penggunaan sarana/alat berupa alat-alat seks (*sex toys*) yang mungkin dimasukkan oleh seorang laki-laki ke dalam vagina wanita walau di luar perkawinan dan dengan paksaan tidak dapat disebut pemerkosaan. Penetrasi penis terhadap vagina harus benar-benar terjadi, jika masih di luar vagina maka tidak dapat disebut pemerkosaan tetapi termasuk percobaan pemerkosaan. Bagian yang sudah termasuk bagian dalam vagina ialah jika telah menyentuh *labia minora* (bibir dalam vagina).

Adanya syarat ini menjadikan hubungan kelamin dalam perkawinan tidak akan pernah masuk kategori pemerkosaan meskipun dilakukan dengan paksaan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan yang dimaksud disini haruslah merujuk ketentuan undang-undang itu khususnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

³⁹ Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Theo, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 102.

menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

b. Harus dilakukan terhadap wanita

Pembuat undang-undang menganggap tidak perlu menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata kondisi ini dianggap tidak mungkin tetapi karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak berakibat buruk atau merugikan, justru perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak karena itu. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa objek pemerkosaan itu haruslah seorang wanita. KUHP menyebutkan adanya berbagai wanita, yaitu wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHP), wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 290 angka (3) KUHP), wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP) dan wanita pada umumnya. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP ialah wanita pada umumnya.⁴⁰

Adanya syarat ini, menutup kemungkinan laki-laki dapat dianggap sebagai korban pemerkosaan. Hal ini logis mengingat bukankah mustahil akan berhasil terpenuhi penetrasi sehingga juga tidak mungkin terjadi persetubuhan jika kondisi laki-laki sedang dalam keadaan terancam atau sedang tidak *mood* atau psikologisnya sedang terancam.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 101.

c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa

Penjelasan yang sangat tepat terhadap maksud kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dijumpai dalam undang-undang baik dalam yurisprudensi. Simon menyatakan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu ringan.⁴¹ Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Menurut *Hoge Raad* dalam *arrest* tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116, mengenai ancaman kekerasan disyaratkan yakni:

- 1) Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- 2) Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.⁴²

Wujud adanya ancaman kekerasan ini haruslah ditafsirkan secara kasuistis dengan mempertimbangkan tingkat kematangan kejiwaan dan kognisi korban yang diancam, sehingga dengan membandingkan dengan orang yang rata-rata sama kematangan jiwa dan kognisinya dengan korban misalnya, ditemukan kesamaan penilaian terhadap ancaman kekerasan,

⁴¹ *Ibid.*, hal. 99.

⁴² *Ibid.*, hal. 98.

maka ancaman kekerasan ini haruslah dianggap telah terjadi. Menurut ketentuan pasal ini, unsur kekerasan dengan unsur ancaman kekerasan bersifat alternatif, dalam pengertian tidaklah harus kekerasan itu telah nyata-nyata terjadi cukup jika telah terbukti adanya ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kesan merugikan atau membahayakan bagi yang diancam, sehingga pada akhirnya kesan merugikan atau membahayakan ini logis karena disertai pula dengan perbuatan pelaku berupa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan.

d. Dengan dirinya sendiri

Yang dimaksud dengan kata-kata “dengan dirinya” adalah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.⁴³ Itu berarti jika seorang laki-laki memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan dengan orang selain dirinya sendiri bukan termasuk pemerkosaan tetapi masuk kategori membantu terjadinya pemerkosaan.

Berdasarkan syarat-syarat pada huruf a, b, c dan d di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan hanya dapat terjadi jika pelakunya adalah seorang laki-laki (karena objeknya perempuan), yang berakibat terjadinya penetrasi penis ke dalam vagina di luar perkawinan yang sah untuk dirinya sendiri, penetrasi itu terjadi karena pemaksaan akibat kekerasan atau ancaman kekerasan.

⁴³ *Ibid.*, hal. 105.

3. Persetubuhan Tanpa Paksaan dalam KUHP

Persetubuhan tanpa paksaan dari pelaku terhadap korban di atur dalam KUHP dengan berbagai bentuk yang dapat dilihat dari dua sisi yaitu: *pertama*, dari sudut hubungan perkawinan; dan kedua, dari sudut umur korban. Jika melihat dari sudut hubungan perkawinan dibagi menjadi persetubuhan tanpa paksaan di luar dan di dalam perkawinan, sedangkan jika dilihat dari sudut umur korban maka dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persetubuhan tanpa paksaan terhadap dewasa dan persetubuhan tanpa paksaan terhadap anak.

- a. Persetubuhan di luar perkawinan terhadap wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Hal ini diatur dalam Pasal 286 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan dengan seorang wanita yang ia ketahui bahwa wanita tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Syarat hubungan kelamin, di luar perkawinan dan dengan wanita sama dengan pembahasan Pasal 285 KUHP. Syarat mutlak lainnya untuk terpenuhinya perbuatan ini adalah adanya keadaan korban (wanita) yang pingsan atau tidak berdaya ini bukan disebabkan perbuatan pelaku. Jika keadaan pingsan atau tidak berdaya itu disebabkan oleh perbuatan pelaku maka perbuatannya diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemerkosaan sebagaimana ketentuan Pasal 285 KUHP karena keadaan pingsan atau tidak berdaya

secara yuridis disamakan dengan melakukan kekerasan (vide Pasal 89 KUHP).

Simon sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan berada dalam keadaan pingsan ialah berada dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan berada dalam keadaan tidak berdaya ialah berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik, yang membuat wanita tersebut tidak berdaya untuk memberikan perlawanan.⁴⁴

Istilah medis untuk pingsan atau *sinkop* adalah hilangnya kesadaran sementara yang terkait dengan kurangnya aliran darah ke otak. Pingsan umumnya terjadi hanya beberapa detik atau menit. Setelah itu, mereka yang pingsan akan kembali sadar atau pulih secara spontan.⁴⁵

Ketentuan Pasal 286 KUHP, tidak secara eksplisit menegaskan perihal umur korban apakah dewasa atau anak tetapi hanya menegaskan perihal kondisi berupa pingsan atau tidak berdaya dan hubungan di luar perkawinan. Pertanyaannya adalah bagaimana jika sekiranya wanita itu dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya dan masih di bawah umur. Peneliti berpendapat bahwa pasal ini dapat diposisikan sebagai ketentuan hukum yang mengatur tentang persetubuhan tanpa paksaan di luar perkawinan baik terhadap wanita dewasa ataupun wanita belum dewasa atau anak.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 111.

⁴⁵ <https://www.halodoc.com/kesehatan/pingsan>. (Online 03 Januari 2021).

- b. Persetubuhan di luar perkawinan terhadap wanita yang umurnya belum lima belas tahun

Persetubuhan di luar perkawinan terhadap wanita yang umurnya belum lima belas tahun diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi barang siapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Menurut van Bemmelen dan van Hattum, ketentuan pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP dibuat untuk mencegah penyalahgunaan ketidakpengalaman anak-anak (*het misbruik maken van jeudige onervarenheid*) oleh orang dewasa. Itulah sebabnya undang-undang melarang perbuatan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan anak-anak yang belum berusia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.⁴⁶ Kata-kata “belum dapat dinikahi” adalah terminologi yuridis yang bermaksud merujuk kepada aturan syarat-syarat perkawinan yang khusus di Indonesia ditentukan bahwa perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Itu berarti bahwa sejak berlakunya UU

⁴⁶ Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Theo, *Op Cit.*, hal. 117-118.

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka usia wanita yang dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP di atas selain belum mencapai usia lima belas tahun juga mencakup wanita yang belum mencapai usia 16 tahun.

Ancaman hukuman dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ini dapat diperberat menjadi selama-lamanya 12 (dua belas) tahun jika menyebabkan luka berat pada tubuh (vide Pasal 291 ayat (1) KUHP) dan jika menyebabkan mati diperberat lagi menjadi 15 (lima belas) tahun (vide Pasal 291 ayat (2) KUHP). Luka berat pada tubuh secara yuridis ditentukan dalam Pasal 90 KUHP, yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Jadi, pasal ini termasuk ke dalam ketentuan hukum yang mengatur perihal persetubuhan tanpa paksaan di luar perkawinan khusus terhadap anak yang belum berusia 15 tahun dan belum berusia 16 tahun.

- c. Persetubuhan dalam perkawinan terhadap wanita yang belum dapat dinikahi

Persetubuhan dalam perkawinan terhadap wanita yang belum dapat dinikahi diatur dalam Pasal 288 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa mengadakan hubungan kelamin dalam pernikahan dengan seorang wanita yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga

bahwa wanita tersebut belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, jika perbuatan itu menimbulkan luka pada tubuh.

- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat pada tubuh, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pernikahan yang dimaksud oleh rumusan Pasal 288 KUHP di atas adalah pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tentang wanita mana yang dapat dipandang sebagai wanita yang belum dapat dinikahi, undang-undang sendiri ternyata tidak memberikan penjelasan, akan tetapi dengan menggunakan metode penafsiran secara teleologis⁴⁷ kiranya wanita yang dimaksud disini adalah wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun, karena undang-undang pidana kita pada dasarnya bermaksud melindungi wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun.

Maksud “wanita yang belum dapat dinikahi” adalah harus merujuk ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang secara

⁴⁷ Penafsiran teleologis (sosiologis) adalah sebuah cara penafsiran undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang sehingga tujuan lebih diperhatikan ketimbang bunyi kata-katanya dan penafsiran ini terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Sutioso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hal. 88.

khusus menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, walaupun memang pada ayat (2) diberikan ruang penyimpangan dari ketentuan ayat (1) dengan meminta dispensasi⁴⁸ kepada Pengadilan. Artinya “wanita yang dapat dinikahi” adalah wanita yang sudah mencapai umur 16 tahun, dan jika belum mencapai umur 16 tahun maka satu-satunya alasan yang dapat mengizinkan pernikahan itu adalah dispensasi pengadilan.

Hal itu berarti bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan Pasal 288 KUHP ini hanya dapat diterapkan terhadap keadaan persetubuhan dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan atas dasar dispensasi pengadilan dan ternyata kemudian akibat persetubuhan itu timbul luka pada tubuh atau luka berat atau bahkan berakibat mati. Jika melihat bunyi Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berbunyi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, dapat diketahui bahwa pada pokoknya seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai umur 21 tahun dilarang/ tidak dapat kawin tanpa izin kedua orang tuanya dan khusus laki-

⁴⁸ Dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxatio legis*). Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 205.

laki yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 tahun dilarang/ tidak dapat kawin kecuali ada izin orang tuanya dan sekaligus juga harus ada dispensasi dari pengadilan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka ketentuan Pasal 288 KUHP ini dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur perihal persetujuan tanpa paksaan dalam perkawinan terhadap anak perempuan yang berusia di bawah 16 tahun. Akan tetapi jika memperhatikan rumusan pasal ini dikaitkan dengan isi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka otomatis Pasal 288 KUHP ini secara faktual telah kehilangan daya berlakunya. Formulasi Pasal 288 KUHP tidaklah mungkin lagi terpenuhi karena terhalang oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang hanya mengizinkan perkawinan bagi wanita jika telah berumur 16 tahun atau di bawah umur 16 tahun dengan kompensasi pengadilan, artinya adalah perkawinan hanya mungkin terjadi jika wanita telah berumur 16 tahun. Wanita di bawah umur 16 tahun belum dapat dinikahi berarti tidak mungkin ada perkawinan kecuali kompensasi pengadilan, sehingga juga tidak mungkin terpenuhi formulasi “persetujuan dalam perkawinan terhadap wanita yang belum dapat dinikahi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 KUHP. Undang-Undang Perkawinan menjamin bahwa perkawinan hanya dapat terjadi terhadap wanita yang dapat dinikahi.

C. Tinjauan Umum tentang Anak

Anak merupakan penerus masa depan bangsa, namun kenyataannya, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih terus mengalami kekerasan. Hal ini dapat dipahami karena anak adalah manusia yang belum memiliki kematangan sosial, pribadi dan mental seperti orang yang telah dewasa. Adapun perbedaan anak dengan orang dewasa terlihat dengan adanya perbedaan umur dan tingkah laku.

Berikut pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu:

- a. Menurut KUHP terdapat pada Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- b. Menurut Hukum Perdata terdapat pada Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- c. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal I ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Pengertian Anak di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah

seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang hukum Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana dalam Undang-Undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memasukkan perbuatan persetubuhan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan. Kesusilaan dalam hal ini adalah kesusilaan moral dengan norma kesopanan, khususnya dibidang seksual. Persetubuhan secara sederhana diartikan sebagai aktifitas atau hubungan seksual yang umum dilakukan untuk memperoleh kenikmatan seksual atau untuk proses memperoleh anak. Persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati.

Sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual. Terminologi persetubuhan dan terminologi pencabulan memiliki perbedaan prinsipil secara yuridis. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Menurut Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah, mengemukakan bahwa perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan dan

homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam.⁴⁹ Perbuatan cabul tidak mengharuskan adanya hubungan kelamin asal saja perbuatan itu dinilai sebagai pelanggaran kesusilaan dalam ruang lingkup nasfu berahi, tetapi persebutuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin. Perbuatan cabul dengan demikian lebih mengandung pengertian yang lebih luas dari pengertian persetubuhan sehingga dikatakan bahwa persetubuhan termasuk perbuatan cabul tetapi perbuatan cabul tidak selalu dapat dikatakan persetubuhan.

KUHP secara tegas memisahkan pengaturan perihal persetubuhan dengan perbuatan cabul mengindikasikan bahwa kedua perbuatan ini secara hukum memiliki perbedaan. Tindak pidana pencabulan terhadap orang dewasa diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 289 KUHP:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 290 ayat (1) KUHP:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum: 1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 294 ayat (2) KUHP:

Dengan hukuman yang serupa dihukum:

(1) Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

⁴⁹ Djubaedah, Neng, *Op Cit.*, hal. 75.

- (2) Pengurus, dokter, guru, pegawai/pejabat, pengawas, atau pembantu suatu lembaga pemasyarakatan, lembaga kerja negara, lembaga pendidikan, rumah yatim piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga-lembaga kebajikan, yang melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pencabulan yang dilakukan khusus terhadap orang belum cukup umur

15 tahun diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Pencabulan terhadap orang yang belum dewasa diatur dalam pasal-

lasal sebagai berikut:

Pasal 292 KUHP:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 KUHP:

- (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan menyesatkan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang tersebut dalam pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing 9 (sembilan) bulan dan 12 (dua belas) bulan

Pasal 294 ayat (1) KUHP

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sementara itu ketentuan Pasal 295 KUHP adalah mengatur tentang menyebabkan/memudahkan pencabulan oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau anak asuhnya yang belum dewasa dengan pihak ketiga orang lain dan jika mangadakan atau memudahkan perbuatan cabul itu menjadi pencaharian atau kebiasaan diatur dalam Pasal 296 KUHP.

Pasal 295 KUHP:

(1) Diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau anak yang dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
 2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga

Pasal 296 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Keseluruhan pasal-pasal terkait tindak pidana pencabulan dalam KUHP dimaksud tidak akan dibahas dalam tulisan ini secara luas, karena fokus pembahasan tulisan ini adalah tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Pengertian anak dalam KUHP selalu terikat dengan ketentuan pasal yang terkait misalnya tentang anak yang berumur di bawah 12 tahun, anak berumur di bawah 15 tahun, anak yang berumur di bawah 16 tahun dan anak yang berumur di bawah 17 tahun sehingga kesemuanya memiliki fungsi dan kepentingan yang berbeda. Anak versi KUHP adalah dipandang dari berbagai sudut kepentingannya yang secara langsung tertuang dalam pasal-pasal terkait. Keseluruhan pengertian anak tersebut termasuk dalam kategori orang yang belum dewasa atau belum cukup umur yang lebih dikenal dengan istilah anak.

Anak yang berumur di bawah 12 tahun misalnya dipergunakan sebagai dasar untuk penuntutan tanpa pengaduan korban. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 287 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Anak yang berumur di bawah 15 tahun dipergunakan sebagai syarat khusus yang diharapkan diketahui oleh pelaku misalnya dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 290 angka 2 dan 3 KUHP. Anak yang berumur di bawah 16 tahun dipergunakan sebagai pedoman bagi hakim dalam penjatuhan

hukuman (pidana). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 45 KUHP yang berbunyi:

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan itu merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Pasal 45 KUHP ini tidak berlaku lagi. Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbunyi: Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUH Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 batas umur pelaku yang dapat dipidana (atau sebagai pedoman hakim dalam pemidanaan terhadap anak) adalah harus telah berumur minimal 8 tahun. Pasal 4 ini kemudian telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011 yang menegaskan bahwa batas usia anak yang dapat diminta pertanggung jawaban hukum yaitu minimal berumur 12 (dua belas) tahun. Putusan MK ini sejalan dengan batas usia yang telah direkomendasikan oleh Komite Hak Anak PBB dalam *General Comment* pada 10 Februari 2007.

Anak yang berumur di bawah 17 tahun dipergunakan sebagai syarat khusus yang diharapkan diketahui oleh pelaku dalam bidang mempertunjukkan tulisan atau gambar yang menyinggung perasaan kesopanan. Ketentuan ini misalnya diatur dalam Pasal 283 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9000,- dihukum barang siapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa orang itu belum cukup umur 17 tahun suatu tulisan, suatu gambar atau suatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau suatu cara yang dipergunakan untuk mencegah atau mengganggu kehamilan, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang dan cara itu diketahuinya.

Secara umum pengertian-pengertian belum cukup umur atau belum dewasa dalam KUHP adalah semakna dengan pengertian anak sebagai lawan kata dari dewasa. Persetubuhan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah dijelaskan tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 81, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kemudian undang-undang ini sudah diperbarui dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 76E dan Pasal 82 yaitu:

Pasal 76E:

Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kasus dalam penelitian ini termasuk dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dimana pada Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs terdakwa dituntut melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut. Adapun dasar hukum yang menjadi tuntutan penuntut umum yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak:

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 64 ayat (1) KUHP:

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Perbuatan terdakwa Wasro Bin Talib dilakukan pada bulan September 2016, atau setidaknya pada waktu waktu tertentu di bulan September 2016 bertempat di rumah terdakwa masuk Dk. Sembung Rt. 06/08 Ds. Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, telah melakukan beberapa perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terhadap anak Jahrotun Binti Rismono. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Terdakwa dan anak Jahrotun, berdasarkan Akte Kelahiran No AL.657.0271863 tanggal 4 Pebruari 2014, anak Jahrotun Binti Rismono lahir pada tanggal 5 Oktober 2001 menunjukkan anak Jahrotun Binti Rismono

berusia 15 tahun yang diantara mereka sudah saling kenal, dan pernah ada hubungan khusus. Saat hari libur dimana anak Jahrotun tidak masuk sekolah, terdakwa mengirim sms/pesan singkat dengan kata-katanya:

Wasro : *"Roh saya masih sayang kamu. kamu masih sayang aku ndak".*

Jahrotun : *"Aku sayang tapi sekedar teman".*

Wasro : *"Roh bisa kesini ndak, saya pengen buktikan kalau saya sayang kamu".*

Anak Jahrotun kemudian datang ke rumah terdakwa, yang dalam keadaan sepi, karena istri terdakwa (Anitasari) sedang belanja ke warung. Setelah bertemu, terdakwa berkata kepada anak Jahrotun.

Wasro : *"Enyong pan mbukttkna angger enyong sayang (aku akan buktikan kalau aku sayang kamu)."*

Jahrotun : *"Aku sayang sebatas kanca ora luwih, mbokan sing wadon ngarti (aku sayang sebatas teman tidak lebih, barangkali istrimu tahu)".*

Wasro : *"Angger berhubungan (bersetubuh) gelem ora (kalau bersetubuh mau tidak)."*

Jahrotun : *"Embuh yah wedi (tidak tahu ya takut)."*

Wasro : *"Angger terjadi apa apa aku tetep tanggung jawab (kalau terjadi apa apa aku tetap tanggung jawab)."*

Kemudian anak Jahrotun diajak masuk kamar terdakwa, selanjutnya di dalam kamar anak Jahrotun disuruh melepas baju. Namun anak Jahrotun tidak mau lalu terdakwa kemudian melepas baju, celana panjang warna hitam putih dan celana dalam warna coklat yang anak Jahrotun pakai. Setelah anak Jahrotun dalam keadaan telanjang, terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya. Terdakwa mencium bibir anak Jahrotun dan tangan kananya meraba-raba payudara dan vagina anak Jahrotun, kemudian memepetkan tubuh anak Jahrotun ke tembok lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak Jahrotun dan menggerakkan pantatnya maju mundur menusuk-nusukan penisnya ke dalam vagina anak Jahrotun selama kurang

lebih 20 menit. Akhirnya terdakwa orgasme dan puas, dan mengeluarkan sperma/air mani di dalam vagina anak Jahrotun. Setelah selesai lalu anak Jahrotun memakai kembali pakaiannya setelah itu anak Jahrotun keluar dari dalam kamar, sebelum pulang terdakwa memberi anak Jahrotun 1 bungkus Adem Sari agar anak Jahrotun mimun di rumah selain itu terdakwa berpesan "*jangan bilang sama teman teman kamu*" lalu anak Jahrotun pulang ke rumah.

Sekitar beberapa hari kemudian, terdakwa mengirim pesan singkat/SMS ke saksi Jahrotun yang isinya:

Wasro : "*Kamu ke sini.*"

Jahrotun : "*Mau ngapain.*"

Wasro : "*Ke sini saja.*"

Kemudian anak Jahrotun berjalan kaki menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa yang dalam keadaan sepi, karena istri terdakwa, yakni saksi Anitasari sedang belanja ke warung. Terdakwa mengajak anak Jahrotun masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa mengunci pintu depan dan memegang tangan kiri anak Jahrotun mengajak masuk kamar terdakwa. Lalu terdakwa melepas baju, celana panjang training wama biru dan celana dalam wama merah yang anak Jahrotun pakai. Setelah anak Jahrotun sudah dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya, lalu terdakwa merebahkan tubuh anak Jahrotun diatas kasur lalu terdakwa menindih anak Jahrotun sambil meraba-raba payudara dan memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina anak Jahrotun sambil menggerakkan pantatnya naik turun menusuk-nusukan penisnya ke

dalam vagina anak Jahrotun selama kurang lebih 10 menit sampai terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma/air mani di dalam vagina anak Jahrotun.

Akibat perbuatan terdakwa, anak Jahrotun hamil. Dan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Sekira Pkl 20.00 Wib anak Jahrotun melahirkan seorang bayi dengan jenis kelamin perempuan dengan operasi Caesar. Hal ini didasarkan *visum et repertum* No.RM/78/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Brebes dan ditandatangani dr.Arie Indrianto, SpOG. Pemeriksaan sepintas korban tiba di RSUD Brebes pada tanggal 17Juni 2017 pukul 10.52 WIB dengan keluhan habis melahirkan 19 hari dengan *Sectio Caesaria* dengan kesimpulan terdapat tanda tanda habis melahirkan dengan *Sectio Caesaria*.

Berdasarkan kasus posisi pada pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs yang telah diuraikan di atas, analisis penulis dasar hukum Penuntut Umum sudah benar menerapkan pasal tindak pidana persetubuhan terhadap anak yaitu berdasar pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam KUHP selalu terikat dengan ketentuan pasal yang terkait misalnya tentang anak yang berumur di bawah 12 tahun, anak berumur di bawah 15 tahun, anak yang berumur di bawah 16 tahun dan anak yang berumur di bawah 17 tahun sehingga kesemuanya memiliki fungsi dan kepentingan yang berbeda. Anak versi KUHP adalah dipandang dari berbagai sudut kepentingannya yang secara langsung tertuang dalam pasal-pasal terkait. Keseluruhan pengertian anak tersebut termasuk

dalam kategori orang yang belum dewasa atau belum cukup umur yang lebih dikenal dengan istilah anak.

Hukum Pidana di Indonesia berlaku asas *lex Speciali derogat lex generalis*, asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81, maka dapat dikatakan bahwa pasal-pasal dalam KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

Jadi Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan “*lex specialis derogate lex generalis*” dari pasal-pasal terkait persetubuhan dalam KUHP, dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari pasal-pasal dalam KUHP. Sedangkan Pasal 64 ayat (1) KUHP digunakan sebagai dasar Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*). Para pakar pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama.⁵⁰

⁵⁰ Leden, Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 37.

Persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Jahrotun dilakukan karena terdakwa tidak bisa menahan nafsu seksualnya, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dilandasi oleh niat yang sama yaitu untuk melampiaskan nafsu seksual terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sama macamnya yaitu dengan cara menyetubuhi saksi korban dengan cara dan di tempat yang sama namun berbeda waktunya namun masih sama-sama di bulan September 2016, dan sebagaimana fakta perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali dilakukan dalam kurun waktu yang tidak lama sehingga perbuatan terdakwa memenuhi syarat sebagai suatu perbuatan yang diteruskan. Unsur jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Oleh karena semua, unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”.

B. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs

Pada dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Tindak

pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP. Pasal 286 KUHP merumuskan mengenai persetubuhan dengan seorang wanita yang sedang dalam keadaan pingsan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun, Pasal 287 KUHP mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita di luar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun dengan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun sedangkan, Pasal 288 KUHP mengatur tentang di dalam pernikahan persetubuhan dilakukan dengan seseorang perempuan yang belum sahnya untuk dinikahi, bila perbuatannya menyebabkan luka dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun jika, perbuatannya sampai menyebabkan luka yang berat dikenakan ancaman dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, dan apabila sampai menimbulkan hilangnya nyawa seseorang dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak. Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bias digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan

pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP.

Kasus perkara putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs, merupakan perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan terdakwa Wasro bin Talib. Berdasarkan kasus posisi yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, terdakwa Wasro Bin Talib didakwa telah melakukan beberapa perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terhadap anak Jahrotun Binti Rismono. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Peranan Surat Dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan dan Surat Dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dituntut adanya kemampuan/kemahiran Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan Surat Dakwaan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan :

1. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
2. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/ analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;

3. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi:

1. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;
2. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Sesuai ketentuan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil.

Meliputi:

1. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.

Seseorang jaksa penuntut umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan, agar terdakwa tidak dapat bebas dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dari surat dakwaan. Seseorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan.

Perkara ini, jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Adapun Penuntut Umum dalam tututannya pada pokoknya mohon majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wasro Bin Talib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Wasro Bin Talib dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - b. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam abu-abu;
 - c. 1 (satu) potong celana pendek warna merah Dikembalikan kepada saksi anak Jahrotun;
 - d. 1 (satu) potong kain motif batik kombinasi warna putih dan coklat Dikembalikan pada saksi Anitasari;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa:

1. Saksi Jahrotun binti Rismono mengaku telah disetubuhi oleh terdakwa Wasro Bin Talib;
2. Saksi Jahrotun binti Rismono pernah berpacaran dengan terdakwa sebelum terdakwa menikah dengan saksi Anita sari binti Bunasir;
3. Saksi Jahrotun Binti Rismono mengaku disetubuhi Kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2016 kurang lebih pukul 08.00 Wib didalam kamar rumah terdakwa di Dk. Sembung Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes dan Kejadian kedua pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2016 kurang lebih pukul 08.00 Wib ditempat kejadian yang sama dalam kamar rumah terdakwa masuk Dk. Sembung Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes;
4. Pada mulanya Terdakwa Wasro Bin Talib menyetubuhi saksi Jahrotun binti Rismono dengan mengirim pesan singkat/SMS yang isinya mengajak saksi Jahrotun binti Rismono untuk bersetubuh saat itu saya saksi Jahrotun masih sekolah SMP dan Dirumah Terdakwa Wasro Bin Talib tidak ada siapa-siapa sepi pada waktu akan menyetubuhi saksi Jahrotun binti Rismono istrinya sedang pergi ke Pasar;

5. Saat itu Terdakwa Wasro Bin Talib berkata kepada saksi Jahrotun binti Rismono “Enyong pan mbuktikan angger enyong sayang “lalu saksi Jahrotun binti Rismono berkata “Aku sayang sebatas kanca ora luwih, mbokan sing wadon ngerti” setelah itu Terdakwa Wasro Bin Talib berkata kepada saksi Jahrotun binti Rismono “Angger berhubungan (bersetubuh) gelem ora” lalu saksi Jahrotun binti Rismono menjawab “ Embuh yah wedi “ lalu Terdakwa Wasro Bin Talib meyakinkan saksi Jahrotun binti Rismono “Angger terjadi apa-apa aku tetep tanggung jawab;
6. Pada waktu datang kerumah terdakwa Wasro Bin Talib pertama kali disetubuhi dengan pakaian celana panjang warna hitam putih dan celana dalam warna coklat dengan cara Wasro Bin Talib yang melepas celana panjang warna hitam putih dan celana dalam warna coklat, setelah melepas celana saksi Jahrotun bin Rismono lalu terdakwa Wasro Bin Talib pada saat pertama kali bersetubuh terdakwa Wasro BIN Talib mengirim pesan singkat/sms selanjutnya Jahrotun bin Rismono datang berjalan kaki kerumah terdakwa Wasro Bin Talib yang jaraknya tidak jauh dari rumah Jahrotun bin Rismono . Sesampainya dirumah terdakwa Wasro Bin Talib Jahrotun bin Rismono disuruh masuk kedalam rumah lalu disuruh masuk kamarnya terdakwa Wasro Bin Talib selanjutnya didalam kamar Jahrotun bin Rismono disuruh melepas baju namun Jahrotun bin Rismono tidak mau lalu terdakwa Wasro Bin Talib juga melepas celana pendek dan celana dalamnya setelah itu mencium bibir Jahrotun bin Rismono dan tangan kanannya meraba-raba payudara dan Meraba-raba vagina Jahrotun

bin Rismono kemudian terdakwa Wasro Bin Talib memepetkan badan Jahrotun bin Rismono ketembok lalu memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Jahrotun bin Rismono lalu menggerakan pantatnya maju mundur menusuk-nusukan penisnya kedalam vagina Jahrotun bin Rismono selama kurang lebih 20 menit lalu mengeluarkan sperma/air mani didalam vagina Jahrotun bin Rismono, setelah selesai lalu Jahrotun bin Rismono memakai celana Jahrotun bin Rismono setelah itu Jahrotun bin Rismono keluar dari dalam kamar Lalu terdakwa Wasro Bin Talib memberi Jahrotun bin Rismono 1 (satu) bungkus Adem sari agar diminum dirumah selain itu terdakwa Wasro Bin Talib bilang “Jangan bilang sama teman-teman kamu” lalu Jahrotun bin Rismono pulang kerumah.

7. Untuk yang kedua kalinya Jahrotun bin Rismono pada waktu datang kerumah terdakwa Wasro Bin Talib kedua kali disetubuhi dengan pakaian celana panjang training warna biru dan celana dalam warna abu-abu dengan cara pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2016 kurang lebih pukul 08.00 wib saat Jahrotun bin Rismono masih libur, tiga hari setelah kejadian pertama terdakwa Wasro Bin Talib mengirim pesan singkat/SMS ke Jahrotun bin Rismono yang isinya "Kamu kesini" lalu ia jawab "mau ngapain?" lalu terdakwa Wasro Bin Talib membalas "kesini saja" lalu Jahrotun bin Rismono dari rumah Jahrotun bin Rismono berjalan kaki menuju rumah terdakwa Wasro Bin Talib, sesampainya dirumah terdakwa Wasro Bin Talib menyuruh Jahrotun bin Rismono masuk

kedalam rumah lalu terdakwa Wasro Bin Talib mengunci pintu depan lalu memegang tangan kiri Jahrotun bin Rismono menuju kamar tempat kejadian pertama. didalam kamar terdakwa Wasro Bin Talib menyuruh Jahrotun bin Rismono melepas pakaian Jahrotun bin Rismono namun karena Jahrotun bin Rismono malu lalu Jahrotun bin Rismono menyuruh terdakwa Wasro Bin Talib keluar dari dalam kamar, tidak lama kemudian terdakwa Wasro Bin Talib masuk kamar lagi dan Jahrotun bin Rismono sudah dalam keadaan melepas pakaian, lalu terdakwa Wasro Bin Talib melepas pakaiannya lalu merebahkan badan Jahrotun bin Rismono diatas kasur lalu menindih badan Jahrotun bin Rismono sambil meraba-raba payudara dan memasukan penisnya kedalam vagina Jahrotun bin Rismono sambil menggerakkan pantatnya naik turun menusuk-nusukan penisnya kedalam vagina Jahrotun bin Rismono selama kurang lebih 10 menit lalu mengeluarkan sperma/air mani didalam vagina Jahrotun bin Rismono, setelah menyetubuhi Jahrotun bin Rismono kemudian Jahrotun bin Rismono merapikan pakaian lalu pergi dari rumah tersebut.

8. *Visum et repertum* No.RM/78/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Brebes dan ditandatangani dr.Arie Indrianto, SpOG dengan hasil pemeriksaan :Pemeriksaan sepintas: korban tiba di RSUD Brebes pada tanggal 17 Juni 2017 pukul 10.52 WIB dengan keluhan habis melahirkan 19 hari dengan Sectio Caesaria. Kepala, wajah, leher, dada,perut: terdapat bekas luka operasi *section caesaria*, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dalam batas normal. Alat Kelamin: Darah

nifas (+) positif, Bibir Kemaluan: Dalam batas normal, Selaput dara: robekan di beberapa tempat sebagian sampai dasar, Anus Dalam batas normal, Kesimpulan: terdapat tanda tanda habis melahirkan dengan Sectio Caesaria.

9. Akibat hubungan yang Jahrotun bin Rismono lakukan dengan Wasro, Jahrotun bin Rismono melahirkan anaknya tersebut secara sesar di Rumah sakit Nahmudah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib ;
10. Terdakwa Wasro Bin Talib pada waktu melakukan perbuatan menyetubuhi saksi Jahrotun binti Rismono tersebut di rumah istrinya terdakwa Wasro Bin Talib didekat rumah saat istrinya sedang pergi kepasar;
11. Terdakwa Wasro Bin Talib pernah datang kerumah saksi Jahrotun bin Rismono setelah saksi Jahrotun melahirkan untuk mengakui menyetubuhi Jahrotun bin Rismono dan membuat surat pernyataan yang disaksikan orang tua saksi Jahrotun, mertua terdakwa dan perangkat desa tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
12. Selain menyetubuhi Jahrotun binti Rismono terdakwa juga menyetubuhi saksi Windiyana yang juga murid terdakwa yang bersama-sama mengaji dengan saksi Jahrotun binti Rismono;
13. Semua keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa terdakwa menyetubuhi saksi Jahrotun binti Rismono dan juga saksi Windiyana disangkal oleh terdakwa termasuk BAP yang dibuat di kepolisian di sangkal terdakwa dengan alasan pada saat pembuatan BAP terdakwa

merasa tertekan juga surat pernyataan yang ditandatangani terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa saat itu ia mengaku karena tertekan karena banyaknya massa yang berada di luar rumah saksi Rismono.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta diperkuat dengan adanya alat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan dan semua itu dapat di pandang saling bersesuaian. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Penerapan hukum pidana pada perkara ini berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”.

Oleh karena perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan terbukti pada terdakwa terdapat kesalahan sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Adapun tujuan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur pada perkara Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan dengan tujuan agar terdakwa jera dan dapat memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

Pemidanaan merupakan hasil keputusan dari majelis hakim, sebelum majelis hakim mengambil keputusan terhadap sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, dalam menerapkan hukum pidana terhadap tindak

pidana persetujuan terhadap anak, maka majelis hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan dan unsur pertanggungjawaban yang ada pada diri terdakwa. Sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga dapat mendatangkan rasa keadilan di masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs menggunakan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dasar hukum ini sudah benar karena hukum Pidana di Indonesia berlaku asas *lex Speciali derogat lex generalis* (aturan khusus mengesampingkan aturan umum). Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak yang merupakan "*lex specialis derogate lex generalis*" dari pasal-pasal terkait persetubuhan dalam KUHP, sehingga penggunaannya harus didahulukan dari pasal-pasal dalam KUHP. Sedangkan Pasal 64 ayat (1) KUHP digunakan sebagai dasar perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*).
2. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dalam Pasal

81 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para penegak hukum diharapkan agar lebih memperhatikan duduk perkara yang berkaitan dengan perbuatan persetubuhan terlebih jika yang menjadi korban adalah anak. Sebab unsur-unsur dalam setiap tindak pidana persetubuhan bias saja menjadi dasar penjatuhan hukuman yang lebih berat bagi pelaku sehingga dapat menindak para pelaku agar lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya.
2. Orang tua agar lebih memperhatikan dan meningkatkan pengawasan terhadap anak dalam pergaulannya serta menjaga hingga dewasa hingga anak tidak dapat berkembang demi masa depannya dengan selalu menanamkan keimanan dan ketaqwaan pada diri anak.
3. Anak dibawah umur diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan pada diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat

menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.

4. Pemerintah diharapkan dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi, karena dari sumber inilah persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini berakar, apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat mencegah ataupun mengurangi peningkatan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ali, Mahrus, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ariman, Rasyid & Raghieb, Fahmi, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Steel, Pidana, Tindak pidana, Teori-teori, Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Fajar ND, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertasi Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentas)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Kansil, C.S.T. & Christine, S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007.
- Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Theo, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Leden, Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Leden, Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar. Grafika, 2009.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011.

Sutioso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2012.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal/Makalah/Artikel:

Hutagalung, P., Hamdan, M., Mulyadi, M., & Barus, U.M. (2014). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan pada Anak (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202 K/Pid.Sus/2009). *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 2, (September 2014: 6-74).

Prakoso, B. (2019). Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana terkait Persetubuhan yang Korbannya Anak melalui Upaya Pembujukan. *Jurnal Penelitian di Bidang Hukum Universitas Gresik (Pro Hukum)*, Vo. 8, No. 1, p-ISSN 2089-7146, e-ISSN 2615-5567.

Prasetyo, A.H. (2019). Peran Anak sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan. *Media Juris*, Vol. 2, No. 1, P-ISSN 2721-8384/E-ISSN 2621-5225.

Widyawati, M. (2018). Tindak Pidana Persetubuhan pada Anak Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 1, ISSN 2621-4105.

Yunastian, Y. & Purwoto, P. (2013). Aspek Hukum Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan PN Banyumas Nomor 74/Pid.Sus/2013/PN Bms Tahun 2013). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, pp. 1-13, Apr. 2017.

CNN Indonesia. (2020). *Inses Kekerasan Seksual Terbanyak Pada Perempuan*. Online: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200224173721-12-477607/inses-kasus-kekerasan-seksual-terbanyak-pada-anak-perempuan>. (cnnindonesia.com, 07 Maret 2020).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemeriksaan>. (Online 03 Januari 2021).

<https://www.halodoc.com/kesehatan/pingsan>. (Online 03 Januari 2021).

PanturaPost. (2021). *Marak Pencabulan Anak di Brebes, Kejaksaaan Ancam Kebiri Kimia Bagi Pelaku*. Online: <https://kumparan.com/panturapost/marak-pencabulan-anak-di-brebes-kejaksaaan-ancam-kebiri-kimia-bagi-pelaku-1v1RFH8f1wL>. (Kumparan.com, 21 Januari 2021).

PanturaPost. (2021). *Marak Pencabulan Anak di Brebes, Kejaksaaan Ancam Kebiri Kimia Bagi Pelaku*. Online: <https://kumparan.com/panturapost/marak-pencabulan-anak-di-brebes-kejaksaaan-ancam-kebiri-kimia-bagi-pelaku-1v1RFH8f1wL>. (Kumparan.com, 21 Januari 2021).